PARTISIPASI ETNIS TIONGHOA DALAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Oleh

Gondo Widodo¹,

Tjahya Supriatna², Muh. Ilham³, Fernandes Simangunsong⁴

¹) Pemerintah Kabupaten Bangka

Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ejjie13@gmail.com

^{2,3,4}) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

The focus of this study was to examine and analyze Tionghoa ethnic participation in strengthening local government and to examine and analyze the attitudes of ethnic Malay people on the participation of ethnic Tionghoa in strengthening regional governance. The Theory used in this study is to use Keith Davis and Newstrom's theory which includes elements: mental and emotional involvement, motivation to contribute and acceptance of responsibility. In addition, to analyze the attitudes of ethnic Malays on Tionghoa participation using the Saifuddin Azwar theory, which measures the attitudes of Malay people by paying attention to the elements of verbal response by paying attention to several categories: cognitive, affective and conative aspects. This study used a descriptive and explorative qualitative research design with locus of 3 subdistricts in Bangka Regency, Bangka Belitung Province. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, documentation, triangulation.

The results of the study revealed that although there were many Tionghoa in Bangka District who participated in the government, their participation was still not optimal. From several aspects of participation studied by Tionghoa ethnicity, they showed positive participation in the form of expertise, money and goods participation and showed negative participation in the form of thought and energy participation. There are several things that motivate Tionghoa in contributing to government, which are seen in physiological needs, job security, appreciation and self-actualization. Besides that Tionghoa people are quite good at accepting responsibility in participation, this can be seen from several indicators, namely doing tasks that are given on time and in accordance with the rules, even though there are some tasks/jobs that are not their own work/effort.

While the attitude of Malay people to Tionghoa after verbally analyzed by paying attention to the categories of cognitive, affective and conative, it can be concluded that the attitude of the Malay ethnic community shows that acceptance of Tionghoa ethnic communities participating in government is due to several factors, especially cultural factors and origins. the Bangka Regency community itself.

Keywords: *participation, regional government, Tionghoa ethnicity, motivation of contributions, responsibilities, attitudes of ethnic Malay communities*

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi etnis Tionghoa serta mengkaji dan menganalisis sikap masyarakat etnis Melayu pada partisipasi yang dilakukan oleh kalangan etnis Tionghoa dalam penguatan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dan eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi etnis Tionghoa dalam pemerintahan masih kurang maksimal. Dari beberapa aspek partisipasi yang diteliti etnis Tionghoa di Kabupaten Bangka menunjukkan partisipasi yang positif dalam bentuk partisipasi keahlian, uang dan barang serta menunjukkan partisipasi yang negatif dalam bentuk partisipasi pemikiran dan tenaga. Terdapat beberapa hal yang memotivasi etnis Tionghoa dalam ikut berkontribusi dalam pemerintahan, yaitu dilihat dalam kebutuhan fisiologis, keamanan kerja, penghargaan dan aktualisasi diri. Selain itu etnis Tionghoa cukup baik dalam penerimaan tanggung jawab dalam partisipasi, hal tersebut dilihat dari beberapa indikator, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan aturan, walaupun ada beberapa tugas/pekerjaan tersebut bukan merupakan karya/upaya sendiri.

Sementara itu, sikap masyarakat Melayu pada etnis Tionghoa setelah dianalisis responsnya secara verbal dengan memperhatikan kategori kognitif, afektif maupun konatif dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat etnis Melayu menunjukkan penerimaan terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang berpartisipasi dalam pemerintahan hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor terutama faktor budaya dan asal-usul dari masyarakat Kabupaten Bangka itu sendiri.

Kata kunci: partisipasi, pemerintahan daerah, etnis Tionghoa, motivasi, tanggung jawab, sikap masyarakat etnis Melayu.

PENDAHULUAN

Etnisitas¹ merupakan sumber kekayaan dan aset bagi suatu bangsa. Keberagaman etnisitas di suatu negara selalu mempunyai dampak seperti dua sisi mata uang, di satu sisi dapat menjadi peluang kekuatan dalam membangun bangsa, namun di sisi lain dapat menjadi ancaman perpecahan bangsa bila suatu negara tidak mampu mengelola keberagaman etnis itu dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut Indonesia sebagai salah satu negara multi-etnis di dunia memiliki jumlah etnis yang sangat banyak

yang terbagi kembali menjadi beberapa sub-etnis. Keberagaman etnis tersebut dalam prosesnya saling berinteraksi menjadi suatu budaya baru yang dianggap sebagai budaya bangsa yang merupakan kekayaan sekaligus juga ancaman disintegrasi bangsa. Keberagaman etnis dianggap dapat memberikan kontribusi yang positif kepada pembangunan bangsa karena setiap etnis memiliki kekhasan terhadap identitas, karakter maupun etos kerja yang saling melengkapi dan dapat digunakan dalam kegiatan pembangunan.

Sebagai negara multi-etnis, masyarakat Indonesia mengenal pembagian etnis berdasarkan dua kelompok besar, yaitu pribumi dan nonpribumi. Kategori nonpribumi biasa dipersepsikan sebagai penduduk migran di Indonesia yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Etnis nonpribumi ini mayoritas berasal dari negara Arab, China, dan India. Dari beberapa

1 Istilah *etnisitas* berasal dari kata *etnis* dan *etnik* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia-KBBI (2002: 309) diartikan sinonim. *Etnik* diartikan bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti dan kedudukan tertentu karena adat, agama, bahasa, dsb, sementara pengertian etnis mengacu pada *etnik*.

negara yang disebutkan tadi, bangsa China-lah yang mendominasi kalangan etnis nonpribumi di Indonesia, di mana dalam perkembangannya etnis China di Indonesia lebih dikenal oleh penduduk Indonesia sebagai etnis Tionghoa. Istilah Tionghoa ini kemudian menjadi sebutan baku yang dipergunakan tidak saja bagi kalangan Tionghoa sendiri tetapi juga kalangan etnis lainnya.

Seperti yang disebutkan di atas etnis Tionghoa merupakan etnis nonpribumi terbesar yang ada di Indonesia memiliki tingkat penyebaran (*difusi*) etnis yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cara untuk melihat komposisi etnik di Indonesia adalah dengan melihat peta demografi penduduk Indonesia, tetapi informasi mengenai komposisi kelompok etnik di Indonesia hanya dapat dilihat dari data sensus penduduk Indonesia pada 1930 dan 2000². Sensus 1930 adalah sensus yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda di Indonesia, sedangkan pada 2000 adalah pertama kali Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia memasukkan data berdasarkan etnisitas.

Berdasarkan data yang dihitung dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012 dapat dilihat bahwa etnis Tionghoa di Provinsi Bangka Belitung merupakan etnis mayoritas terbesar kedua setelah etnis Melayu di mana hal tersebut tidak terjadi di wilayah lain di Indonesia. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada etnis Tionghoa yang ada di Kabupaten Bangka. Alasan penelitian dilakukan di Bangka, sebab etnis Tionghoa di Bangka merupakan suatu kelompok yang unik di antara minoritas Tionghoa di Indonesia. Dalam persepsi umum masyarakat Indonesia terhadap orang Tionghoa, biasanya muncul dalam bayangan orang yang mapan, kaya atau pengusaha

yang menguasai sektor ekonomi. Namun pada kenyataannya warga etnis Tionghoa di Kabupaten Bangka menempati berbagai lapangan pekerjaan. Jenis pekerjaan bergerak di sektor pedagang kecil, pemilik toko, petani dan nelayan. Tidak jarang komunitas ini kehidupannya di bawah garis kemiskinan.

Selain itu terjadi peningkatan jumlah kalangan etnis Tionghoa yang duduk dan berkerja di dalam pemerintahan, yaitu sebagai aparatur sipil negara (ASN) perangkat desa maupun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di mana hal tersebut sangat jarang terjadi pada masa-masa sebelum reformasi. Oleh karena itu akan diteliti lebih terperinci mengenai bagaimana terjadinya partisipasi masyarakat dalam bentuk kontribusi yang diberikan, motivasi dalam memberikan kontribusi serta penerimaan tanggung jawab dalam partisipasi selain itu juga akan diteliti sikap masyarakat etnis Melayu terhadap partisipasi etnis Tionghoa dalam penguatan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan beberapa masalah yang telah diidentifikasi di atas, dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah partisipasi etnis Tionghoa dalam penguatan pemerintah daerah di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Bagaimanakah sikap masyarakat etnis Melayu terhadap partisipasi etnis Tionghoa dalam penguatan pemerintah daerah di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah

2 *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in Changing political Landscape*, Leo Suryadinata dkk, ISEAS, Singapore 2003, hal.13.

terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan objektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang ada. Berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif.

Sugiyono mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³

Penelitian kualitatif dapat diasumsikan ke dalam kategori penelitian partisipatif di mana desain penelitiannya memiliki fleksibilitas atau sangat mungkin terjadi perubahan untuk menyesuaikan dengan pedoman yang disusun berdasarkan fenomena sebenarnya di lokasi penelitian. Oleh sebab itu, sang peneliti tidak mengetahui berkaitan dengan informan penelitian serta pertanyaan yang akan diajukan, tetapi dalam proses penelitian diperbolehkan melakukan perubahan terhadap desain penelitian.⁴ Berdasarkan pendapat tersebut dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara serta catatan-catatan dari hasil pengamatan di lapangan. penulis mengambil data wawancara

dengan para informan yang bertindak selaku pelaksana dan kelompok sasaran dari kebijakan. Menurut Rusidi informan adalah sumber data primer yang mampu memberikan informasi mengenai diri/keadaan orang lain, atau memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungannya.⁵

Secara umum ada dua teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu sampling probabilitas yang cenderung bersifat kuantitatif dengan analisis statistik, dan teknik sampling Non-Probabilitas yang cenderung bersifat kualitatif. Untuk menjawab permasalahan khusus yang sulit diungkapkan dan tidak mudah dianalisis secara statistik, maka teknik sampling Non-Probabilitas akan lebih tepat dan dapat lebih berguna dalam proses pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya teknik sampling Non-Probabilitas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Jenis-jenis Sampling dalam Teknik Sampling Non-Probabilitas

No.	Jenis Sampling	Prinsip Pelaksanaan
1.	<i>Haphazard</i> (sembarang, seadanya)	Mengambil berbagai kasus dengan cara-cara yang disukai peneliti.
2.	<i>Quota</i> (memilih/menentukan kategori)	Mengambil sejumlah kasus diawali dengan menentukan beberapa kategori yang dapat menunjukkan perbedaan populasi,
3.	<i>Purposive</i> (menentukan/menyesuaikan)	Mengambil semua kasus yang mungkin sesuai dengan kriteria tertentu melalui penggunaan berbagai metode.

3 Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, hal: 1

4 Fernandes Simangunsong, Metodologi Penelitian Pemerintahan, Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2016, hal. 190.

5 Rusidi, 2006, Metodologi Penelitian, Bahan Ajar pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Pemerintahan Daerah, Jatinangor, hal. 14

No.	Jenis Sampling	Prinsip Pelaksanaan
4.	<i>Snowball</i> (bola salju)	Mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang yang lain atau satu kasus dengan kasus lain,
5.	<i>Deviant Case</i> (kasus penyimpangan)	Mengambil kasus-kasus yang secara substansi berbeda dari pola-pola yang dominan
6.	<i>Sequential</i> (berurutan)	Mengambil kasus-kasus sampai tidak ada informasi tambahan atau karakteristik-karakteristik yang baru
7.	<i>Theoretical</i> (bersifat teoretis)	M e n g a m b i l kasus-kasus yang akan membantu m e m u n c u l k a n gambaran yang penting secara teoretis mengenai suatu topik/ setting tertentu

Sumber: Newman *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*⁶

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik sampling yang digunakan adalah *proposive sampling*. Seperti yang dijelaskan pada tabel di atas *proposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut misalnya sampel tersebut dianggap sebagai orang yang paling tahu mengenai apa yang diharapkan peneliti atau orang yang mempunyai kekuasaan terhadap objek penelitian sehingga mudah untuk mengamati objek/fenomena yang diteliti.

Informan dapat dinyatakan sebagai orang nomor satu setelah peneliti karena

tanpa informan peneliti akan kebingungan dalam menungkapkan permasalahan. Pada penelitian kualitatif, informan yang dijadikan sebagai sumber adalah informan yang kompeten, memiliki relevansi dengan setting sosial yang diteliti, di mana setting sosial itu sendiri menyangkut situasi dan kondisi lingkungan tempat yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Analisis Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Penguatan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya pada bagian ini akan dibahas hasil-hasil dari penelitian disesuaikan dengan konsep partisipasi yang dijelaskan oleh Keith Davis dan Newstrom yang menyatakan bahwa

“Participative manager consult with their employees, bringing them in on problems and decisions so that they work together as a team. The managers are not autocrats, but neither are they free-rein managers who abandon their management responsibilities. Participative manager still retain ultimate responsibility for the operation of their units. But they have learned to share operating responsibility with does who perform the work. They result is that employees fell a sense of involvement in group goals. It follows that participation is mental and emotional involvement of person in group situations that encourage them to contribute to group goals and share responsibility for them. There are three important ideas in this definition-involvement, contribution, and responsibility.”⁷

6 Newman, w. L, 2003, "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach", Allyn and Bacon, Boston

7 Davis and Newstrom, 1985, *Human Behavior at Work: Organization Behavior*, McGraw-Hill, Singapore hal.187

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga pokok gagasan yang dibahas dalam partisipasi, yaitu *mental and emotional involvement* (keterlibatan mental dan emosional), *motivation to contribute* (motivasi kontribusi) dan *accaptence of responsibility* (penerimaan tanggung jawab). Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam implementasi program/kebijakan, di mana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program pemerintah tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat meliputi dimensi sebagai berikut.

► **Mental and Emotional Involvement (Keterlibatan Mental dan Emosional)**

Dari hasil penelitian ditemukan beberapa bentuk keterlibatan/partisipasi etnis Tionghoa dalam pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka, yaitu:

• **Kontribusi Pemikiran**

Partisipasi dalam bentuk pemikiran etnis Tionghoa di Kabupaten Bangka dalam kegiatan pemerintahan daerah terlihat dari adanya etnis Tionghoa yang menjadi *stakeholder* dalam perumusan, proses implementasi sampai evaluasi kebijakan publik di Kabupaten Bangka. Walaupun ikut terlibat namun secara umum sumbangan dalam bentuk pemikiran dari masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Bangka masih sangat rendah hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kehadiran yang rendah dalam kegiatan Musrenbang kelurahan maupun kecamatan, walaupun ada hanya terbatas pada kepentingan yang sifatnya lokal yang bersentuhan dengan kepentingannya maupun kepentingan kelompok masyarakatnya saja. Karena latar belakang sifat dalam budaya etnis Tionghoa

yang individualis membuat masyarakat etnis Tionghoa terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan sumbangan pemikiran contohnya dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan terbatas pada kepentingan pribadi atau keluarganya saja dan kurang peduli terhadap kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar. Berpartisipasinya masyarakat etnis Tionghoa dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan yang membutuhkan partisipasi pemikiran masih terbatas pada kalangan etnis Tionghoa yang memang pekerjaannya berada dalam lingkungan pemerintahan daerah seperti kepala desa, Perangkat desa, Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun, pengurus Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan kalangan etnis Tionghoa yang merupakan Aparatur Sipil Negara baik dari PNS ataupun honorer. Dalam memberikan sumbangan pemikiran masyarakat etnis Tionghoa masih dalam bentuk individu, belum ada organisasi yang bersifat politik atau sosial dengan latar belakang etnis Tionghoa di Kabupaten Bangka. Satu-satunya organisasi yang latar belakang anggotanya berasal dari kalangan etnis Tionghoa di Kabupaten Bangka adalah Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN).

• **Kontribusi Keahlian**

Etnis Tionghoa memberikan kontribusi keahlian yang sangat besar terhadap pemerintahan di Kabupaten Bangka. Beberapa etnis Tionghoa yang menjadi ASN rata-rata berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan pendidikan. Profesi mereka dalam ASN di dominasi sebagai tenaga kesehatan (dokter, apoteker) dan guru (PAUD, TK, SD, SMP, SMA) di mana dalam profesi tersebut mereka memberikan kontribusi dalam sumbangan keahlian bagi pemerintah daerah.

Selain itu sektor pertambangan sebagai andalan dan komoditas utama Kabupaten

Bangka sekaligus merupakan daya tarik bagi masyarakat daerah lain (pendatang) untuk mengadu nasib ke Pulau Bangka merupakan warisan dari keahlian etnis Tionghoa. Teknik pengelolaan pertambangan timah berasal dari keahlian masyarakat etnis Tionghoa yang diturunkan dari generasi ke generasi dan selanjutnya mengalami transfer keahlian kepada penduduk lokal. Keahlian menambang timah baik dalam skala penambangan rakyat maupun penambangan yang dilakukan dalam skala besar oleh pemerintah tidak terlepas dari sejarah keberadaan etnis Tionghoa itu sendiri yakni awalnya kedatangan (migrasi) etnis Tionghoa di Nusantara khususnya di Kabupaten Bangka sengaja didatangkan pemerintah Belanda dari wilayah-wilayah pertambangan di China untuk mengelola pertambangan timah di Pulau Bangka. Sampai saat ini penggunaan istilah-istilah pertambangan timah dan penamaan wilayah-wilayah terutama daerah ekstambang di Kabupaten Bangka berasal dari bahasa Hakka.

Etnis Tionghoa di Kabupaten Bangka juga melakukan transfer pengetahuan terhadap keahlian mereka dalam hal pertukangan, pertanian, kuliner dan industri kecil kepada masyarakat etnis lokal (Melayu). Saat ini masyarakat dari kalangan etnis Tionghoa masih banyak yang berprofesi sebagai petani, montir, tukang bangunan maupun rumah makan, di mana dalam menjalankan profesinya tersebut mereka sangat profesional dan secara kualitas hasil pekerjaan mereka memiliki mutu yang jauh lebih baik dibandingkan hasil pekerjaan dari kalangan etnis Melayu yang menekuni profesi serupa.

Sementara itu etnis Tionghoa juga memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi berupa pengetahuan-pengetahuan mengenai keahlian khususnya dalam pengelolaan hasil laut. Wilayah Bangka yang merupakan daerah kepulauan di mana

kaya akan sumber daya alam hasil laut. di Kabupaten Bangka sektor industri kecil dan menengah dalam pengelolaan hasil laut merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat yang utama khususnya di Kabupaten Bangka dan provinsi kepulauan Bangka Belitung pada umumnya. Pada awalnya pengelolaan hasil laut tersebut hanya ditekuni oleh masyarakat etnis Tionghoa dengan mempekerjakan masyarakat lokal, tetapi seiring waktu banyak masyarakat etnis Melayu yang menekuni usaha pengelolaan hasil laut tersebut. Makanan khas yang ada di Bangka Belitung seperti otak-otak, empek-empek, bakmi, martabak (*hok lo pan*), *Kwetiau*, *mie Bangka* dan lain-lain merupakan kuliner yang berasal dari pengetahuan dan keahlian masyarakat etnis Tionghoa.

• Kontribusi Tenaga

Etnis Tionghoa ikut juga berpartisipasi dalam bentuk tenaga walaupun secara derajat partisipasi tersebut masih sangat kurang karena keterlibatan mereka sangat minimal. Penyebab kurangnya partisipasi dalam bentuk tenaga disebabkan oleh faktor utama, yaitu jenis dari pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat etnis Tionghoa mengharuskan mereka untuk terlibat secara aktif pada bidang usahanya selain itu faktor budaya tidak kalah penting menyebabkan kurangnya partisipasi di mana etnis Tionghoa lebih bersifat individualistis dan budaya kekeluargaan yang kental di mana mereka lebih mementingkan pribadi dan keluarganya dibandingkan kepentingan lain yang lebih besar serta tertarik untuk berpartisipasi apabila menyangkut kepentingannya yang bersifat lokal saja.

Keterlibatan etnis Tionghoa dalam program-program pemerintah yang bersifat pemberdayaan juga sangat kurang. Etnis Tionghoa dirasa kurang antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut walaupun sudah dilakukan sosialisasi. Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sifatnya swakelola dan

kemudian diupahkan kepada pihak ketiga merupakan bukti bahwa program-program pemberdayaan yang dilaksanakan belum maksimal dan tepat sasaran. Adapun penyebab kurangnya keterlibatan etnis Tionghoa dalam program-program pemerintah tersebut karena adanya persepsi dari kalangan etnis Tionghoa bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah tersebut sulit, terlalu birokratis dan memiliki aspek hukum sehingga tidak mau terlibat dalam kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

- **Kontribusi Uang**

Berdasarkan pengamatan di lapangan etnis Tionghoa masih banyak yang memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga walaupun relatif kecil. Partisipasi sesama etnis Tionghoa tampak berbeda berdasarkan tingkat ekonominya. Partisipasi orang Tionghoa yang kaya lebih banyak dalam bentuk uang tunai sedangkan orang Tionghoa kurang mampu lebih sering terlibat langsung dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti. Tetapi secara umum dibandingkan memberikan partisipasi dalam bentuk tenaga yang membutuhkan kehadiran fisik, masyarakat etnis Tionghoa lebih tertarik untuk memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan uang, hal tersebut sebagai bentuk kompensasi dari ketidakhadiran mereka dalam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan partisipasi fisik. Hal itu dianggap wajar oleh etnis Melayu karena orang China memiliki kesibukan untuk mengurus bisnisnya sehingga cenderung memberikan bantuan dalam bentuk uang. Selain itu masyarakat etnis Tionghoa beranggapan bahwa sumbangan dalam bentuk uang lebih praktis dan fleksibel sehingga pemanfaatannya dapat lebih tepat sasaran. Pemberian kontribusi dalam bentuk uang biasanya terbatas dalam konteks keagamaan saja, kontribusi masyarakat yang paling jelas terlihat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan adalah sumbangan uang

dalam pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Besar Negara di mana pengusaha-pengusaha dari etnis Tionghoa sering menjadi donatur dalam kegiatan tersebut.

- **Kontribusi Barang**

Pada dasarnya sumbangan dalam bentuk barang cukup baik dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Bangka. Hal tersebut terlihat dari sumbangan-sumbangan dalam bentuk material untuk pembangunan fasilitas umum, mengingat kalangan etnis Tionghoa merupakan pedagang maka tidak terlalu sulit bagi mereka untuk memberikan sumbangan dalam bentuk barang. Selain itu masyarakat etnis Tionghoa juga memberikan kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik di tingkat Pemerintah Daerah, Kecamatan maupun Kelurahan/desa, mereka turut mendukung kegiatan pemerintah dengan membantu meminjamkan barang-barang berupa kendaraan, perlengkapan dan sebagainya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut.

Keberadaan masyarakat etnis Tionghoa yang berada di luar daerah juga turut memberikan kontribusi bagi daerah asalnya, dengan memberikan sumbangan dalam bentuk uang dan barang. Selain itu terjadi sekarang ini terjadi perubahan pola pemberian kontribusi yang dahulu terbatas pada sumbangan dalam bentuk uang saat ini juga banyak etnis Tionghoa yang memberikan sumbangan dalam bentuk barang/natural, hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa sumbangan dalam bentuk natural/barang lebih tepat sasaran dan lebih sulit untuk diselewengkan.

Pemberian sumbangan dalam bentuk barang kepada pemerintah dipandang sebagian masyarakat etnis Melayu sebagai bentuk pemberian kompensasi kepada pemerintah dengan harapan adanya imbal balik dari pemerintah kepada dirinya/usahanya. Kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh masyarakat etnis Tionghoa

terkadang memiliki motif yang berbeda yang sering kali salah diinterpretasikan oleh pejabat-pejabat dalam pemerintahan. Motif pemberian kontribusi kepada pemerintah tersebut biasanya dalam rangka mencari dukungan terhadap kegiatan-kegiatan usaha mereka dalam suatu wilayah.

► **Motivation to Contribute (Motivasi Kontribusi)**

Dalam motivasi dalam memberikan kontribusi etnis Tionghoa dalam pemerintahan dianalisis berdasarkan faktor kebutuhannya di mana menurut konsep Maslow berpendapat bahwa kebutuhan manusia sebagai pendorong (motivator) membentuk suatu hierarki atau jenjang peringkat. Menurut Abraham Maslow, ada lima tingkatan kebutuhan manusia, yaitu *physiological needs*, *safety needs*, *the belongingness and love needs*, *the esteem needs*, dan *the needs for self-actualization*. Jenjang motivasi bersifat mengikat, maksudnya kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpenuhi sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi.⁸ Pada bagian ini akan dianalisis faktor yang memotivasi masyarakat etnis Tionghoa dalam partisipasinya dalam pemerintahan daerah berdasarkan kebutuhannya.

• **Physiological Needs (Kebutuhan Fisiologis)**

Motivasi etnis Tionghoa untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dalam kaitannya berkerja dalam pemerintahan yang paling dasar adalah keinginan untuk mendapatkan penghasilan, seiring dengan semakin sulitnya mencari pekerjaan pada masa pascatimah di Kabupaten Bangka. Selain ini sedikitnya alternatif pekerjaan dan semakin baiknya pola penghasilan di

beberapa bidang pemerintahan daerah membuat masyarakat etnis Tionghoa tertarik untuk bekerja dalam bidang pemerintahan.

• **Safety Needs (Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan Kerja)**

Berkerja dalam lingkungan pemerintahan daerah dianggap sebagai suatu pekerjaan dengan tingkat risiko yang rendah baik risiko yang sifatnya fisik maupun nonfisik. Pekerjaan sebagai aparatur pemerintah daerah juga memberikan jaminan terhadap kesehatan dan jaminan hari tua dalam bentuk dana pensiun. Selain itu pekerjaan dalam sektor formal di pemerintahan daerah walaupun memiliki jumlah penghasilan yang relatif kecil dibandingkan sektor perdagangan dan lainnya tetapi memiliki kepastian dalam hal pendapatan, berbeda dengan jenis pekerjaan nonformal lainnya yang banyak digeluti oleh masyarakat etnis Tionghoa.

• **The Belongingness and Love Needs (Kebutuhan Sosial)**

Keberadaan etnis Tionghoa di dalam pemerintahan sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang aneh bagi komunitas etnis Tionghoa mengingat mayoritas dari etnis Tionghoa bekerja di sector informal (swasta). Jika dikaitkan dengan sifat dari etnis Tionghoa yang individualistis dan lingkungan sosial mereka yang bersifat informal maka tidak ditemukan adanya motivasi yang didorong oleh kebutuhan sosial, yaitu keinginan untuk bergaul dan berkelompok dengan orang lain serta diterima dalam kelompok/komunitasnya karena pada dasarnya komunitas Tionghoa bukan berada pada lingkungan yang formal.

• **The Esteem Needs (Kebutuhan Penghargaan)**

Motivasi etnis Tionghoa terlibat di pemerintahan disebabkan oleh banyak faktor antara lain profesi dan posisi dalam pemerintahan daerah baik eksekutif

8 Maslow, Abraham. 1954, *Motivation and Personality*. Harper & Row, Publisher, Inc. hal. 35-46

maupun yudikatif memiliki tingkat *prestige* yang tinggi dalam lingkungan masyarakat baik di dalam komunitas etnis Tionghoa maupun di komunitas lain, seperti etnis Melayu. Penghargaan komunitas etnis Tionghoa terhadap keberadaan etnis Tionghoa di dalam pemerintahan disebabkan sudah semakin baiknya tingkat pemahaman generasi muda etnis Tionghoa yang sudah banyak mengenyam pendidikan formal dan semakin banyaknya keterlibatan tokoh-tokoh elite etnis. Tionghoa di dalam dunia pemerintahan baik dalam skala Nasional maupun lokal. Selain itu partisipasi dalam bentuk pemberian kontribusi-kontribusi dalam bentuk uang maupun barang selain karena faktor *prestige* dan penghormatan dari masyarakat juga untuk menjaga eksistensi mereka dalam stratifikasi sosialnya dalam lingkungan masyarakat etnis Tionghoa maupun etnis lainnya.

- ***The Needs for Self-Actualization* (Kebutuhan aktualisasi diri)**

Masyarakat etnis Tionghoa dari kalangan profesional tertarik untuk berkerja dalam bidang pemerintahan karena adanya kejelasan mengenai pola karier bagi mereka di mana senioritas, profesionalitas dan peningkatan kompetensi adalah bagian dari pemberian reward and punishment. Selain itu sistem karier di pemerintahan adalah sistem terbuka berbeda dengan sistem karier di sektor swasta yang tertutup maupun semi terbuka di mana biasa terjadi pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki asing maupun kepemilikan oleh keluarga. Selain itu kalangan etnis Tionghoa yang berpartisipasi dalam pemerintahan khususnya di bidang legislatif merasa dengan menjadi anggota dewan dapat lebih mengaktualisasikan dirinya dengan cara memengaruhi dan membuat kebijakan-kebijakan secara langsung serta menjadi mitra bagi pemerintah daerah dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan hanya memberikan masukan-masukan kepada pemerintah sebagai masyarakat biasa.

- ▶ ***Acceptance Responsibility (Penerimaan Tanggung Jawab)***

Seseorang dikatakan telah berpartisipasi apabila telah menunjukkan tanggung jawab atas keterlibatannya. Untuk mengukur tanggung jawab sebagai bentuk partisipasi etnis Tionghoa dalam penelitian ini maka dapat dilihat dari tiga indikator sebagaimana dikemukakan Nurul Zuriah, yaitu (1) Menyelesaikan tugas tepat waktu; (2) Mengerjakan sesuai petunjuk; (3) Mengerjakan tugas berdasarkan hasil karya sendiri.⁹

- **Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu**

Dalam hal penyelesaian tugas tepat pada waktunya masyarakat etnis Tionghoa lebih baik dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi pemerintahan seperti pertanggungjawaban Dana desa, tugas administrative yang diberikan oleh pemerintah di tingkat atasnya seperti kecamatan maupun kabupaten dibandingkan etnis Melayu itu sendiri. Hal tersebut tidak terlepas karena faktor etos kerja yang melekat pada budaya etnisnya, di mana etnis Tionghoa sebagai etnis pendatang harus lebih giat dalam bekerja untuk menyesuaikan dengan situasi daerah untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya.

- **Mengerjakan sesuai petunjuk**

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik sebagai pegawai pemerintah atau bukan etnis Tionghoa selalu mengikuti aturan yang telah

9 Nurul Zuriah, 2011, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan, PT. Bumi Aksara, Jakarta,

ditetapkan. Hal tersebut dapat terlihat sampai saat ini belum ada kalangan pegawai pemerintah maupun anggota legislatif yang berasal dari kalangan etnis Tionghoa tersangkut masalah hukum terkait dengan pengelolaan keuangan maupun dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya pegawai-pegawai pemerintah dan perangkat desa yang tersangkut masalah hukum baik yang sudah divonis maupun dalam proses penyelidikan dan persidangan menjadi semacam *shock therapy* bagi etnis Tionghoa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu belum adanya kasus hukum yang menjerat etnis etnis Tionghoa bukan berarti etnis Tionghoa lebih baik dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dibandingkan dengan etnis Melayu, hal tersebut belum relevan untuk di bandingkan mengingat secara rasio etnis Tionghoa yang terlibat dalam pemerintah relatif masih sedikit dibandingkan dengan etnis Melayu.

- **Mengerjakan Tugas Berdasarkan Hasil Karya Sendiri**

Masyarakat etnis Tionghoa dalam mengerjakan tugas/urusan pemerintah berdasarkan karya sendiri masih sangat rendah, di mana keterlibatan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan masih banyak dikerjakan/diwakili oleh orang lain atau pihak ketiga dan bukan merupakan hasil usaha sendiri. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan swadaya maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan yang seharusnya dilaksanakan secara padat karya pada kenyataannya banyak yang dikerjakan/diupahkan kepada pihak lain. Mengingat salah satu faktor keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah tingkat partisipasi masyarakat maka secara tidak langsung hal tersebut menyebabkan program pemberdayaan tersebut menjadi tidak berhasil atau tidak tepat sasaran.

Sikap Masyarakat Etnis Melayu pada Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Penguatan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam penelitian ini sikap masyarakat etnis Melayu terhadap masyarakat etnis Tionghoa dilihat dari dua tipe respons, yaitu pertama, tipe respons verbal yang terbagi menjadi kategori respons kognitif, afektif dan konatif, serta kedua, tipe respons nonverbal yang terbagi menjadi kategori respons kognitif, afektif dan konatif. Karena keterbatasan instrumen penelitian dan sulitnya meneliti respons nonverbal karena informasi yang didapat dari sikap yang diberikan bersifat tidak langsung. Maka dalam penelitian ini respons hanya dilihat dari tipe respons verbal di mana dalam konteks penelitian ini respons dapat diterjemahkan sebagai sikap dari masyarakat etnis Melayu terhadap Masyarakat etnis Tionghoa sebagai hasil rangsangan/interaksi kegiatan partisipasinya dalam pemerintahan.

Seperti yang dijelaskan oleh Azwar (2013) yang menjelaskan bahwa komponen kognitif berisi kepercayaan mengenai apa yang berlaku dan apa yang benar bagi objek sikap. Sering kali apa yang dipercayai seseorang itu merupakan stereotip atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikiran. Kepercayaan datang dari apa yang dilihat dan apa yang diketahui, berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui terbentuklah suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum suatu objek. Kepercayaan dapat terus berkembang pengalaman pribadi, apa yang di bicarakan orang lain dan kebutuhan emosional merupakan determinan utama dalam terbentuknya kepercayaan. Pengalaman pribadi yang digeneralisasikan itulah yang membentuk stereotip. Apabila stereotip itu sudah mengakar sejak lama, maka orang kemudian akan mempunyai sikap yang lebih didasarkan pada predikat yang melekat pada pola *stereotip*-nya dan bukan

didasarkan pada objek sikap tertentu. Sikap yang didasari pola stereotip semacam ini biasanya sangat sulit menerima perubahan. Kepercayaan sebagai komponen kognitif tidak selalu akurat. Kadang-kadang kepercayaan ini terbentuk justru karena dikarenakan kurang atau tiadanya informasi yang benar mengenai objek yang dihadapi.¹⁰

- **Respons Verbal Kognitif**

Respons verbal etnis Melayu terhadap etnis Tionghoa jika dilihat dari aspek kognitif terlihat secara umum masyarakat etnis Melayu mempercayai bahwa masyarakat etnis Tionghoa sudah sewajarnya ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan sebagai warga negara. Faktor kepercayaan yang diyakini secara kolektif bahwa etnis Melayu dan etnis Tionghoa pada dasarnya merupakan kelompok etnis yang telah terjadi pembauran karena proses perkawinan campuran sehingga pada dasarnya etnis Melayu dan Tionghoa Bangka memiliki garis keturunan dari nenek moyang yang sama. Selain itu faktor adanya kepercayaan yang terbentuk dalam simbol-simbol dan semboyan di dalam masyarakat disertai faktor-faktor lain yang mendukung, menciptakan penerimaan etnis Tionghoa di dalam masyarakat etnis Melayu berjalan secara alami tanpa adanya konflik dan polemik.

- **Respons Verbal Afektif**

Respons verbal etnis Melayu terhadap etnis Tionghoa jika dilihat dari aspek afektif secara umum masyarakat etnis Melayu merasa bahwa etnis Tionghoa sudah terlibat/berpartisipasi dalam pemerintahan walaupun di beberapa bagian masih terdapat kekurangan tetapi etnis Melayu merasa tidak berkeberatan dengan bentuk kompensasi yang diberikan oleh etnis Tionghoa. Dalam

pelaksanaan partisipasi etnis Melayu bersikap menerima keterlibatan etnis Tionghoa dalam pemerintahan, hal tersebut terlihat dari tidak adanya sikap diskriminatif etnis Melayu terhadap etnis Tionghoa di dalam implementasinya. Selain itu faktor historis di mana kelompok migran orang China yang datang ke Bangka merupakan kelompok buruh dan petani miskin dari subetnis Hakka yang cenderung mudah menyesuaikan diri dengan kehidupan perantauan, membuat proses asimilasi dengan penduduk lokal berjalan tanpa konflik.

- **Respons Verbal Konatif**

Sikap penerimaan etnis Melayu terhadap etnis Tionghoa secara konatif paling nampak dari terpilihnya anggota legislatif dari kalangan etnis Tionghoa Bangka sebagai perwakilan dari masyarakat Bangka Belitung. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor budaya Bangka yang terbentuk dari zaman dahulu ditambah budaya asli Melayu Bangka yang bersifat terbuka dan menerima pengaruh dari budaya lain yang telah terbentuk lama dari proses interaksinya dengan Tionghoa. Selain itu hubungan yang bersifat mutualisme antara orang Tionghoa dan orang Melayu membuat suatu pola ketergantungan antara etnis Melayu dan Tionghoa dalam sektor ekonomi, contohnya apabila lebaran Idul Fitri maka perekonomian menjadi vakum karena penyedia barang yang rata-rata dari etnis Melayu sedang merayakan lebaran sedangkan apabila imlek pedagang yang mayoritas dari etnis Tionghoa tidak melakukan aktivitas perdagangan karena sedang merayakan imlek

SIMPULAN

- **Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Penguatan Pemerintahan Daerah**

Dari lima aspek kontribusi yang diteliti ada dua aspek kontribusi yang dianggap belum maksimal yang dilakukan oleh etnis

10 Azwar, Saifuddin, 2013, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 25-26

Tionghoa, yaitu: Kontribusi Pemikiran dan Kontribusi Tenaga. Rendahnya tingkat kontribusi pemikiran dari hasil penelitian nampak dari rendahnya keterlibatan kalangan etnis Tionghoa untuk terlibat dalam proses perumusan program dan kebijakan di lingkungannya seperti mengikuti kegiatan Musrenbang. Keterlibatan mereka merupakan keterlibatan yang minimal yang hanya berfokus pada kepentingan pribadi dan keluarganya saja. Selain itu dalam kontribusi tenaga etnis Tionghoa terbagi menjadi dua kelompok yakni orang kaya yang tinggal di wilayah kelurahan dan kalangan masyarakat Tionghoa yang berdomisili di desa. Pada kalangan etnis Tionghoa di Kelurahan kontribusi dalam bentuk tenaga sangat rendah, berdasarkan hasil penelitian hal tersebut lebih karena pada faktor jenis pekerjaan dan tingkat ekonomi, sedangkan pada komunitas etnis Tionghoa yang ada di perdesaan kontribusi tenaga masih banyak dilakukan terutama yang menyangkut urusan keagamaan, tetapi secara akumulatif derajat partisipasi mereka masih rendah.

Partisipasi dalam memberikan kontribusi ditinjau dari hal yang memotivasi kalangan etnis Tionghoa dilihat dari faktor kebutuhan. Berdasarkan hasil pembahasan kalangan etnis Tionghoa tidak memiliki motivasi berdasarkan *The Belongingness and Love Needs* (Kebutuhan sosial) karena keberadaan etnis Tionghoa di dalam pemerintahan sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang aneh bagi komunitas etnis Tionghoa mengingat mayoritas dari etnis Tionghoa bekerja di sektor informal (swasta). Jika dikaitkan dengan sifat dari etnis Tionghoa yang individualistis dan lingkungan sosial mereka yang bersifat informal maka tidak ditemukan adanya motivasi yang didorong oleh kebutuhan sosial, yaitu keinginan untuk bergaul dan berkelompok dengan orang lain serta diterima dalam kelompok/komunitasnya karena pada dasarnya komunitas Tionghoa bukan berada pada lingkungan yang formal.

Dalam hal *Acceptance Responsibility* (Penerimaan Tanggung Jawab) partisipasi etnis Tionghoa dalam pemerintahan ada tiga hal yang menjadi focus penelitian, yaitu penyelesaian tugas tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai dengan aturan dan mengerjakan tugas sebagai hasil karya sendiri. Dari beberapa focus penelitian tadi dalam kaitannya dengan penerimaan tanggung jawab Masyarakat etnis Tionghoa dalam mengerjakan tugas/urusan pemerintah berdasarkan karya sendiri masih sangat rendah, di mana keterlibatan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan masih banyak dikerjakan/diwakili oleh orang lain atau pihak ketiga dan bukan merupakan hasil usaha sendiri.

- **Sikap Etnis Melayu terhadap Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Penguatan Pemerintahan Daerah**

Sikap masyarakat etnis Melayu terhadap kalangan etnis Tionghoa berkaitan dengan partisipasinya dalam pemerintahan adalah secara umum masyarakat etnis Melayu mendukung partisipasi etnis Tionghoa dalam pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka. Hal tersebut disimpulkan peneliti dengan memperhatikan komponen dari sikap, yaitu aspek kognitif, afektif dan konatifnya. Secara kognitif etnis Melayu mempercayai bahwa masyarakat etnis Tionghoa sudah sewajarnya ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan sebagai warga negara. Karena faktor adanya kepercayaan yang terbentuk dalam simbol-simbol dan semboyan di dalam masyarakat disertai faktor-faktor lain yang mendukung, menciptakan penerimaan etnis Tionghoa di dalam masyarakat etnis Melayu berjalan secara alami tanpa adanya konflik dan polemik.

Ditinjau dari aspek afektif secara umum masyarakat etnis Melayu merasa bahwa etnis Melayu sudah terlibat/berpartisipasi dalam pemerintahan walaupun di beberapa bagian masih terdapat kekurangan tetapi etnis Melayu merasa tidak berkeberatan dengan

bentuk kompensasi yang diberikan oleh etnis Tionghoa. Dalam pelaksanaan partisipasi etnis Melayu bersikap menerima keterlibatan etnis Tionghoa dalam pemerintahan, hal tersebut terlihat dari tidak adanya sikap diskriminatif etnis Melayu terhadap etnis Tionghoa di dalam implementasinya.

Bila dilihat dari aspek konatif perilaku yang mencerminkan dukungan terhadap etnis Tionghoa di antaranya adalah mengikutsertakan etnis Tionghoa dalam kegiatan pemerintah dengan mengundang rapat atau kegiatan-kegiatan pemerintah daerah lainnya, adanya bahasa Tionghoa (hakka) yang banyak digunakan etnis Melayu dalam keseharian, kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh etnis Melayu pada -hari keagamaan atau kegiatan lainnya (perkawinan, kematian) serta terpilihnya dua di antara tiga perwakilan Bangka Belitung di DPR pusat. Hal-hal tersebut menunjukkan perilaku dukungan masyarakat etnis Melayu terhadap etnis Tionghoa di dalam pemerintahan.

SARAN

Secara teoretis partisipasi etnis Tionghoa dalam pemerintahan daerah yang telah dianalisis dengan pendekatan deskriptif harus dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan pendekatan yang berbeda agar penelitian ini lebih komprehensif. Selain itu agar penelitian lebih komprehensif sebaiknya dilakukan pengukuran terhadap *performance* atau kinerja terhadap kalangan etnis Tionghoa yang berpartisipasi di dalam pemerintahan

Secara praktis hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi etnis Tionghoa dalam pemerintahan adalah (1) Mendorong partisipasi etnis Tionghoa dalam pemerintahan daerah terutama keterlibatan etnis Tionghoa dalam memberikan partisipasi terutama dalam bentuk sumbangan pemikiran dan tenaga; (2) Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada etnis Tionghoa terutama generasi mudanya agar ikut terlibat dalam kegiatan-

kegiatan pemerintahan serta menghindari sikap-sikap eksklusivitas, kurangnya kepekaan social sehingga diharapkan terjadi perubahan cara pandang (*stereotip*) etnis lain terhadap gambaran umum mengenai etnis Tionghoa selama ini; (3) Peningkatan tingkat pendidikan yang lebih baik terhadap generasi muda etnis Tionghoa sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan pemahaman etnis Tionghoa terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan, dan (4) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur desa/kelurahan dan kecamatan dengan melaksanakan Pendidikan dan pelatihan dalam memahami dan membina wilayah, khususnya wilayah-wilayah dengan tingkat heterogenitas etnis yang tinggi, untuk menghindari konflik-konflik komunal karena faktor etnisitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, 1988. *Sikap Manusia, Teori, dan Pengukurannya*, psikologi, Liberty, Yogyakarta.
- Davis, K & Newstrom, 1985. *Human Behavior to Work: Organization Behavior*, McGraw-Hill.
- Maslow, Abraham. 1954, *Motivation and Personality*. Harper & Row, Publisher, Inc
- Newman, W. L, 2003, "*Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*", Allyn and Bacon, Boston
- Suryadinata, Leo, dkk, 2003. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in Changing Political Landscape*.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Simangunsong, Fernandes, 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- Rusidi, 2006. *Metodologi Penelitian: Bahan Ajar pada Program Pascasarjana MAPD*, Jatinangor, Bandung.
- Zuriah, Nurul, 2011. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Prespektif perubahan*. PT Bumi Aksara, Jakarta.